



NEWSLETTER PUSDATIN

Daftar Isi

- Pusdatin Gelar Simulasi Bcp 2026: Uji Kesiapsiagaan Pemulihan Insiden Siber, Halaman 1
- Bijak Menggunakan Aplikasi Kerja, Kunci Membangun Budaya Digital di Lingkungan Kerja, Halaman 4
- Pusdatin Dampingi Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Ditjen Perkebunan Tahun 2026, Halaman 5
- Hasil Sensus Statistik Perusahaan Ternak Besar dan Kecil – Badan Pusat Statistik, Halaman 6
- Satu Data Hortikultura: Sinergi BPS dan Kementerian Pertanian dalam Sinkronisasi Angka Sementara Hortikultura Tahun 2025, Halaman 7
- Ketika Penyuluh Pertanian Diminta Merangkap Pengumpul Data, Halaman 10
- Gerakan Tanam Padi Program Cetak Sawah Rakyat: Penguatan Produksi Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Halaman 11

Mohon Kesiadaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



bit.ly/surveipusdatin

Pusdatin Gelar Simulasi BCP 2026:

Uji Kesiapsiagaan Pemulihan Insiden Siber

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian melaksanakan Simulasi *Business Continuity Plan* (BCP) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan informasi dan tindak lanjut temuan *Audit Surveilans-1 ISO 27001:2022*. Kegiatan ini secara resmi dimulai pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 09.00 WIB di Ruang *Security Operation Center* (SOC) dan seluruh rangkaian skenario dinyatakan selesai pada Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 07.05 WIB.

Simulasi ini dirancang untuk menguji kesiapan organisasi dalam menghadapi insiden keamanan siber, khususnya skenario *web defacement* atau penyisipan link judi online pada sistem elektronik lingkup Kementerian Pertanian. Melalui metode *full simulation*, seluruh tahapan penanganan insiden dijalankan seolah-olah terjadi kondisi nyata, melibatkan Tim Kerja Keamanan Siber (Kamsiber) dan Tim Kerja Pelindungan Data Pribadi (PDP) dari Kelompok Substansi Kamsiber dan PDP, serta Tim Kerja Sistem Jaringan Komputer (SJK) dari Kelompok Substansi Pengembangan Sistem Informasi (PSI), Penyelenggara Sistem Elektronik, serta unsur manajemen sebagai otoritas pengambil keputusan.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur:

Kepala Bagian Umum

Editor:

Roydatul Zikria, S.Si., M.S.E
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom., MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Suyati, S.Kom
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Lilik Wulaningtyas, S.Kom

Fotografer:

Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis:

Dhanang Susatyo, SE
Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat:

Rizky Purnama R, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Rahma Andany, S.Kom
Yusri Ardi, S.Kom
Marwati
Priatna Sari
Aryo Wicaksono, S.Kom, M.m

Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 7822638
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

Ketua Kelompok Kamsiber dan PDP sekaligus Pimpinan Simulasi, Teuku Ardhianzah, menjelaskan bahwa simulasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk memastikan proses pemulihan layanan berjalan sesuai target *Recovery Time Objective* (RTO) yang telah ditetapkan, yaitu 515 menit. “Simulasi BCP ini adalah bentuk komitmen kami dalam memastikan bahwa setiap insiden dapat ditangani secara terstruktur, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Kami ingin memastikan bahwa ketika insiden nyata terjadi, tidak ada kebingungan dalam alur koordinasi maupun eksekusi teknis,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa skenario yang diangkat sangat relevan dengan dinamika ancaman siber saat ini. Modus *web defacement* dengan penyisipan konten atau tautan ilegal kerap menysasar instansi pemerintah untuk merusak reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kemampuan deteksi dini, respons cepat, serta pemulihan sistem menjadi indikator utama dalam uji coba BCP tahun ini

Rangkaian simulasi dimulai dengan aktivitas pemantauan rutin oleh Tim Kamsiber menggunakan aplikasi *Domain Crawler* (scan. domain.id) milik Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pada pukul 09.00 hingga 09.05 WIB, tim berhasil mengidentifikasi adanya indikasi *web defacement* berupa penyisipan link judi online pada salah satu subdomain sistem elektronik. Temuan tersebut kemudian divalidasi dan didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) serta pencatatan log temuan sebagai *evidence* awal.

Selanjutnya, pada pukul 09.05 hingga 09.10 WIB, Tim Kamsiber melakukan pemberitahuan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dan Tim SJK untuk segera melakukan *suspend* domain eksternal yang terdampak agar konten yang telah disusupi tidak lagi dapat diakses publik. Langkah ini menjadi krusial untuk membatasi dampak reputasi serta mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum.

Ketua Kelompok PSI, Bayu Mulyana, fase awal

menekankan pentingnya sinergi lintas tim dalam penanganan. “Dalam situasi insiden, kecepatan dan kejelasan komunikasi menjadi kunci. Tim pengembangan sistem harus segera berkoordinasi dengan keamanan siber dan tim jaringan agar proses isolasi sistem terdampak dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan lain yang masih berjalan normal,” ungkapnya.



Suasana Simulasi BCP di Ruang Security Operation Center (SOC) Pusdatin Kementerian Pertanian pada Jumat (13/2/2026), saat Tim Kamsiber dan Tim SJK melakukan pemantauan dan investigasi.

Setelah laporan *evidence* diterima dan didisposisikan kepada Tim Teknis Infrastruktur, pada pukul 09.15 hingga 09.20 WIB dilakukan tindakan *suspend* atau penutupan akses *subdomain* publik. Secara paralel, Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan pemberitahuan gangguan layanan melalui notifikasi atau banner pada *website*, sebagai bentuk transparansi kepada pengguna layanan

Tahap berikutnya memasuki proses investigasi teknis yang lebih mendalam. Mulai pukul 09.25 hingga 11.25 WIB, Tim Kamsiber melakukan *scanning Indicator of Compromises* (IoC) serta *Vulnerability Assessment* untuk mengidentifikasi sumber celah keamanan yang dimanfaatkan pelaku. Hasil pemindaian ini dituangkan dalam laporan celah keamanan yang menjadi dasar perbaikan sistem.

Teuku Ardhianzah menjelaskan bahwa tahapan investigasi merupakan inti dari proses pemulihan. “Kami tidak hanya fokus memulihkan tampilan *website*, tetapi memastikan akar masalahnya teridentifikasi dan ditutup. Tanpa investigasi menyeluruh, insiden serupa bisa terulang.

Oleh karena itu, *scanning IoC* dan *vulnerability assessment* menjadi tahapan yang tidak bisa dilewati,” tegasnya.

Memasuki fase pemulihan, pada pukul 11.25 hingga 15.25 WIB Penyelenggara Sistem Elektronik mengajukan permohonan aktivasi VPN kepada SJK untuk melakukan perbaikan sistem secara aman dari sisi jaringan internal. Perbaikan dilakukan sesuai rekomendasi hasil investigasi, termasuk *patching* celah keamanan dan penguatan konfigurasi sistem. Seluruh aktivitas perbaikan didokumentasikan dalam Berita Acara Perbaikan sebagai bagian dari tata kelola yang akuntabel.

Setelah laporan perbaikan diterima pada pukul 15.25 hingga 15.30 WIB, Tim Kamsiber kembali melakukan validasi hasil perbaikan melalui pemindaian ulang guna memastikan sistem telah bersih dari indikasi kompromi. Hasil scan dinyatakan bersih pada pukul 16.30 WIB, yang kemudian menjadi dasar bagi Tim Teknis SJK untuk membuka kembali atau mem-publish subdomain yang sebelumnya di *suspend*.

Proses publish ulang sistem pada pukul 16.30 hingga 16.35 WIB menandai kembalinya layanan kepada publik. Namun demikian, rangkaian simulasi belum berhenti pada tahap tersebut. Tim Kamsiber masih melakukan verifikasi akhir serta menyusun laporan post-mortem penanganan insiden hingga pukul 17.35 WIB. Laporan ini memuat kronologi kejadian, analisis akar masalah, tindakan korektif, serta rekomendasi peningkatan pengendalian keamanan.

Meski secara teknis skenario utama telah selesai pada sore hari tanggal 13 Februari 2026, kegiatan evaluasi komprehensif dan penutupan resmi rangkaian simulasi baru dinyatakan tuntas pada Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 07.05 WIB. Tahap akhir ini mencakup konsolidasi dokumen, validasi formulir pengujian BCP, serta penegasan komitmen tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.

Bayu Mulyana menyampaikan bahwa hasil simulasi ini akan menjadi bahan penting dalam

penguatan arsitektur sistem ke depan. “Dari simulasi ini, kami memperoleh gambaran nyata mengenai titik-titik kritis dalam integrasi sistem. Ke depan, kami akan meningkatkan mekanisme *hardening* aplikasi, penguatan kontrol akses, serta mempercepat proses *deployment patch* keamanan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa aspek dokumentasi menjadi nilai tambah dalam simulasi tahun ini. Seluruh proses tercatat melalui formulir pengujian BCP, lembar disposisi, bukti tangkapan layar, hingga laporan akhir. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap standar ISO 27001:2022, tetapi juga memperkuat budaya keamanan informasi di lingkungan Pusdatin.

Teuku Ardhianzah menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. “BCP bukan sekadar dokumen yang disimpan di rak. Ia harus diuji, diperbarui, dan dipahami oleh seluruh pihak terkait. Simulasi ini menunjukkan bahwa koordinasi kita berjalan efektif dan target RTO dapat dicapai. Namun, kami tidak akan berpuas diri. Ancaman siber terus berkembang, sehingga kesiapsiagaan juga harus terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Dengan selesainya seluruh rangkaian simulasi pada 14 Februari 2026 pukul 07.05 WIB, Pusdatin Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis digital. Melalui pengujian berkala, evaluasi menyeluruh, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pusdatin berupaya memastikan bahwa setiap gangguan, baik teknis maupun akibat serangan siber, dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pertanian

Penulis: Nugroho Setyabudhi

Bijak Menggunakan Aplikasi Kerja, Kunci Membangun Budaya Digital di Lingkungan Kerja

Pemanfaatan aplikasi digital dalam lingkungan kerja pemerintahan semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Berbagai layanan berbasis aplikasi kini hadir untuk mendukung proses administrasi, kolaborasi, hingga pengelolaan data secara lebih cepat dan efisien. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat satu hal penting yang perlu terus dibangun, yakni budaya digital yang bijak dan bertanggung jawab. Budaya digital tidak hanya berbicara tentang kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga tentang kesadaran dalam menjaga keamanan akun, mengelola data dengan baik, serta memanfaatkan fitur aplikasi secara optimal. Hal ini menjadi penting karena setiap aktivitas digital yang dilakukan pegawai pada dasarnya turut memengaruhi kualitas layanan organisasi secara keseluruhan

Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah tantangan yang mengiringi penggunaan aplikasi kerja. Mulai dari penggunaan akun secara bergantian, *password* yang kurang aman, hingga kebiasaan menyimpan dokumen kerja pada media pribadi tanpa perlindungan memadai. Selain berpotensi menimbulkan risiko keamanan informasi, kondisi tersebut juga dapat menghambat efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah dikembangkan.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah aplikasi kerja juga menuntut adanya literasi digital yang memadai. Pegawai diharapkan tidak hanya menggunakan aplikasi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memahami manfaat fitur yang tersedia untuk mendukung produktivitas kerja. Pemanfaatan fitur kolaborasi, manajemen dokumen, maupun notifikasi misalnya, dapat membantu mempercepat alur kerja dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.

Kesadaran untuk memperbarui data secara berkala juga menjadi bagian penting dalam budaya digital. Data yang akurat dan mutakhir akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem yang digunakan. Oleh karena itu, kedisiplinan

dalam mengelola data menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengguna aplikasi.

Lebih dari itu, penggunaan kanal resmi organisasi dalam berbagi informasi kerja turut menjadi langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga keamanan data. Kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan maupun email phishing juga perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari literasi keamanan informasi di era digital.

Membangun budaya digital pada akhirnya bukan hanya tugas unit pengelola teknologi informasi, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pegawai. Setiap individu memiliki peran dalam memastikan bahwa aplikasi kerja digunakan secara aman, efektif, dan sesuai dengan tujuan pengembangannya.

Seiring dengan terus berkembangnya transformasi digital di lingkungan kerja, diharapkan kesadaran dan kebiasaan digital yang baik dapat tumbuh menjadi budaya organisasi. Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi kerja tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, serta kualitas layanan yang diberikan.

Penulis: Lilik Wulaningtyas

Pusdatin Dampingi Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Ditjen Perkebunan Tahun 2026

Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian kembali menunjukkan perannya sebagai penggerak transformasi digital melalui kegiatan pendampingan penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peta Rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4–5 Februari 2026 bertempat di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Bogor, dengan melibatkan tim teknis Pusdatin serta perwakilan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkebunan.

Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4–5 Februari 2026 bertempat di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Bogor, dengan melibatkan tim teknis Pusdatin serta perwakilan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkebunan.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana berjalan selaras dengan kebijakan transformasi digital Kementerian Pertanian, sekaligus mendukung integrasi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Ditjen Perkebunan.

Kegiatan diawali dengan identifikasi dan pemetaan proses bisnis (Probis) sebagai fondasi utama dalam penyusunan arsitektur SPBE. Pada tahap ini, masing-masing unit kerja memaparkan tugas dan fungsi serta alur kerja layanan yang dijalankan. Tim Pusdatin kemudian memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi aktor, aktivitas utama, output layanan, serta keterkaitan antar proses bisnis. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk diagram alur proses bisnis yang menggambarkan hubungan antar layanan secara menyeluruh.

Setelah proses bisnis terpetakan, kegiatan dilanjutkan dengan identifikasi data yang dihasilkan maupun digunakan pada setiap proses. Tahap ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan integrasi data, serta menghindari duplikasi pengelolaan informasi. Tim juga mendiskusikan kebutuhan standar data dan peluang integrasi dengan sistem yang telah ada di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tahapan berikutnya adalah pemetaan aplikasi yang mendukung proses bisnis Ditjen Perkebunan. Dalam sesi ini, peserta menginventarisasi aplikasi eksisting, mengidentifikasi kesenjangan layanan digital, serta merumuskan kebutuhan pengembangan aplikasi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan portofolio aplikasi yang lebih terarah dan selaras dengan prioritas organisasi.

Selain aspek aplikasi, pendampingan juga mencakup pembahasan arsitektur infrastruktur dan keamanan informasi. Diskusi difokuskan pada kebutuhan jaringan, server, penyimpanan data, serta mekanisme pengamanan sistem yang mendukung keberlangsungan layanan

digital secara andal dan aman.

Seluruh hasil pemetaan kemudian dirumuskan dalam peta rencana SPBE Ditjen Perkebunan Tahun 2026 yang memuat prioritas pengembangan, tahapan implementasi, serta arah integrasi layanan digital ke depan. Peta rencana ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Ditjen Perkebunan, sekaligus mendukung pencapaian target SPBE Kementerian Pertanian secara keseluruhan.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Pusdatin tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan keselarasan perencanaan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis organisasi. Kolaborasi yang terbangun antara Pusdatin dan Ditjen Perkebunan diharapkan dapat mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Ke depan, hasil penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana ini akan menjadi dasar dalam pengembangan layanan digital Ditjen Perkebunan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan sektor pertanian.

Penulis : Lilik Wulaningtyas

Hasil Sensus Statistik Perusahaan Ternak Besar dan Kecil – Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2025 Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Sensus Perusahaan Peternakan khususnya ternak besar dan ternak kecil. Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah penyediaan statistik dasar Perusahaan Peternakan. Tujuan khusus dilaksanakan kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan perhitungan PDB, pemenuhan kebutuhan data statistik ketenagakerjaan, pemenuhan kebutuhan data statistik upah, dan pemenuhan kebutuhan stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian. Ternak besar yang dimaksud meliputi sapi potong, kerbau dan kuda. Sementara yang tergolong ternak kecil adalah kambing, domba dan babi

Perusahaan peternakan ternak besar dan ternak

kecil yang dicakup adalah seluruh perusahaan berbadan hukum atau berbentuk badan usaha (PT/PN/PD/ Perum, CV, Firma, Koperasi, dan Yayasan) yang menjalankan usahanya secara terus menerus pada suatu lokasi tertentu untuk tujuan komersial (memperoleh keuntungan). Kegiatan usaha tersebut meliputi pembibitan dan budidaya ternak.

Cakupan kegiatan ini adalah seluruh wilayah Indonesia, dengan unit observasi Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil (budidaya dan pembibitan). Metode pengumpulan data dengan pendataan lengkap, dan tatacara pengumpulan data dilakukan secara wawancara. Pemeriksaan hasil pengumpulan data dilakukan dengan penerapan rule validasi pada aplikasi, editing dan imputasi data, pengecekan konsistensi dan koherensi, dan diskusi pra rilis. Level penyajian data di Tingkat Provinsi. Target sampel adalah sebanyak 212 perusahaan ternak besar dan kecil.

Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil didefinisikan sebagai perusahaan berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pembibitan dan/ atau budidaya ternak besar (sapi potong, kerbau, dan kuda) serta ternak kecil (kambing, domba, dan babi). Pada tahun 2024, terdapat 212 perusahaan yang masih aktif atau secara konsisten menjalankan kegiatan usaha peternakan. Selain itu, terdapat 15 perusahaan dalam kondisi tidak aktif atau tutup sementara. Dengan demikian, total perusahaan peternakan ternak besar dan ternak kecil di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 227 perusahaan. Dari total 227 perusahaan ternak besar dan ternak kecil pada tahun 2024, sebanyak 25 perusahaan melakukan pembibitan sapi potong, 2 perusahaan melakukan pembibitan kerbau, 7 perusahaan melakukan pembibitan kambing, 13 perusahaan melakukan pembibitan domba, serta 9 perusahaan melakukan pembibitan babi. Namun demikian, hanya 18 perusahaan peternakan yang menjadikan pembibitan ternak sebagai kegiatan utamanya. Pembibitan ternak adalah kegiatan pemeliharaan ternak dengan tujuan utama memperoleh anakan, yaitu bakalan (ternak muda) yang mewarisi sifat-sifat unggul melalui proses pemuliaan ternak.

Pada tahun 2024, terdapat 209 perusahaan yang bergerak di bidang budidaya ternak.

Budidaya ternak merupakan kegiatan yang mencakup pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangbiakan ternak. Dari jumlah tersebut, 170 perusahaan di antaranya fokus pada budidaya sapi potong, 29 perusahaan melakukan budidaya domba, 25 perusahaan melakukan budidaya babi, 21 perusahaan melakukan budidaya kambing, 8 perusahaan membudidayakan kerbau, dan 4 perusahaan membudidayakan kuda. Perlu dicatat bahwa satu perusahaan dapat membudidayakan lebih dari satu jenis ternak.

Populasi sapi potong di perusahaan peternakan pada akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 168.522 ekor, atau mengalami peningkatan sebesar 8,76 persen dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan proporsi jenis kelamin, persentase sapi potong jantan lebih tinggi dibandingkan sapi potong betina, yaitu sebesar 72,27 persen. Hal ini disebabkan karena pada umumnya sapi jantan dipelihara untuk tujuan produksi daging, sedangkan sapi betina dipelihara sebagai indukan untuk keperluan pengembangbiakan.

Selain membudidayakan ternak besar seperti sapi potong, kerbau, dan kuda, perusahaan peternakan juga memelihara ternak kecil, yaitu kambing, domba, dan babi. Kambing dan domba merupakan jenis ternak kecil yang banyak dibudidayakan karena pemeliharaannya relatif mudah serta permintaannya yang stabil di pasar mudah serta permintaannya yang stabil di pasar.

Pada tahun 2024, perusahaan peternakan ternak besar dan ternak kecil setidaknya berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 6.116 orang pekerja, terdiri dari 4.570 orang yang dipekerjakan secara tetap (pekerja tetap) dan 1.546 orang yang dipekerjakan secara tidak tetap (pekerja honorer). Komposisi pekerja berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 93,72 persen pekerja adalah laki-laki, sementara 6,28 persen lainnya adalah perempuan.

Berdasarkan hasil sementara Statistik Perusahaan Peternakan tahun 2024 yang dihasilkan oleh BPS, pemasukan dari Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil tahun 2024 sebesar Rp. 3,53 triliun rupiah, sementara pengeluaran sebesar Rp. 2,2 triliun rupiah. Keuntungan Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil tahun 2024 sebesar Rp. 1,33 triliun rupiah.

Pengeluaran terbesar Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil adalah untuk pakan sebesar 68,31%. Pengeluaran lainnya untuk upah/gaji sebesar 16,61%, untuk obat-obatan 4,43%, untuk listrik dan air 1,12%, untuk bahan bakar dan pelumas 2,08% serta untuk lainnya 7,44%.

Khusus untuk Perusahaan Peternakan Sapi pada tahun 2024, nilai rata-rata pertambahan bobot sapi per ekor setahun sebesar Rp 5,276 juta. Struktur ongkos untuk usaha ternak sapi sebagian besar untuk pembelian pakan/konsentrat sebesar 35,69%, untuk pakan hijauan 20,90%, untuk upah/gaji sebesar 14,01%, untuk pakan lainnya 13,06%, untuk BBM dan pelumas 1,90%, untuk listrik dan air 1,14%, pembelian obat-obatan 4,93% dan untuk pengeluaran lain 8,37%.

Khusus untuk Perusahaan Kambing pada tahun 2024, nilai rata-rata pertambahan bobot kambing per ekor setahun sebesar Rp 1,202 juta. Struktur ongkos untuk usaha ternak kambing sebagian besar untuk pembayaran upah/gaji sebesar 52,18%, Untuk pakan konsentrat 15,32%, untuk pakan hijauan 10,10%, untuk pakan lainnya 17,08%, untuk BBM dan pelumas 1,92%, untuk listrik dan air 1,63%, pembelian obat-obatan 1,21% dan untuk pengeluaran lain 0,56%.

Nilai rata-rata pertambahan bobot ternak hasil Sensus Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Kecil tahun 2024, menunjukkan nilai pertambahan bobot ternak yang tertinggi adalah ternak kerbau sebesar Rp 5,42,- juta per ekor setahun, diikuti oleh ternak sapi sebesar Rp 5,28,- juta per ekor setahun, ternak kuda Rp 3,44 juta per ekor setahun, ternak babi Rp 2,50,- juta per ekor setahun, ternak kambing Rp 1,20,- juta per ekor setahun, dan Rp 1,13,- juta per ekor setahun

Penulis : Mohammad Chafid

Satu Data Hortikultura:

Sinergi BPS dan Kementerian Pertanian dalam Sinkronisasi Angka Sementara Hortikultura Tahun 2025

Data sebagai Fondasi Kebijakan Hortikultura

Data tidak lagi sekadar deretan angka dalam tabel statistik. Data telah menjadi fondasi utama

dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, hingga evaluasi program pembangunan. Dalam konteks hortikultura yang mencakup komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan florikultura ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan, pengendalian inflasi pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola data hortikultura nasional melalui semangat Satu Data Hortikultura. Sinergi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian dalam proses sinkronisasi Angka Sementara (ASEM) hortikultura menandai babak baru kolaborasi kelembagaan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Kolaborasi ini bukan sekadar menyamakan angka. Lebih dari itu, ia merupakan upaya menyatukan metodologi, memperkuat validasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap statistik pertanian nasional.

Tantangan Data Hortikultura

Komoditas hortikultura memiliki karakteristik unik dibandingkan tanaman pangan utama seperti padi atau jagung. Siklus panen yang relatif singkat, fluktuasi produksi yang tinggi akibat faktor cuaca, serta sensitivitas harga terhadap pasokan membuat sektor ini sangat dinamis. Dalam situasi seperti ini, perbedaan kecil dalam metode pengumpulan data dapat menghasilkan disparitas angka yang signifikan.

Sebelum penguatan koordinasi lintas lembaga, sering kali terjadi perbedaan antara data produksi yang dihimpun oleh instansi teknis dan data yang dirilis sebagai statistik resmi. Perbedaan tersebut bukan semata-mata karena kesalahan, melainkan karena variasi dalam definisi operasional, cakupan wilayah, periode referensi, hingga metode estimasi.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola data hortikultura nasional melalui semangat Satu Data Hortikultura. Sinergi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian dalam proses sinkronisasi Angka Sementara (ASEM) hortikultura menandai babak baru kolaborasi kelembagaan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Kolaborasi ini bukan sekadar menyamakan angka. Lebih dari itu, ia merupakan upaya menyatukan metodologi, memperkuat validasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap

statistik pertanian nasional

Sinkronisasi Angka Sementara Hortikultura Tahun 2025



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura (Hotman Fajar Simanjuntak)

Sinkronisasi Angka Sementara (ASEM) Hortikultura Tahun 2025 dilaksanakan secara daring tanggal 3 Februari 2026. Acara dibuka oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura (Hotman Fajar Simanjuntak), dihadiri Direktur Statistik Sumber Daya Hayati-BPS (Eko Marsoro) beserta jajarannya, perwakilan Direktorat Sistem Informasi Statistik-BPS, perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Buah dan Florikultura, serta Petugas Data SPH Dinas Pertanian dan BPS Provinsi seluruh Indonesia.

Data ASEM Hortikultura Tahun 2025 adalah hasil olahan SPH (Statistik Pertanian Hortikultura) adalah sistem pengumpulan data bulanan dan triwulanan mengenai luas panen, produksi, serta produktivitas tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias)) di Indonesia. Data SPH dikelola bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian untuk mendukung perencanaan kebijakan. SPH online per tanggal 23 Januari 2026 setelah proses revalidasi, dengan presensi pemasukan Formulir SPH adalah sebagai berikut: (1) Formulir SPH-Sayuran Buah Semusim dengan presensi clean 93,56%; (2) Formulir SPH-Buah Sayuran Tahunan dengan presensi clean 90,78%; (3) SPH-Tanaman Biofarmaka dengan presensi clean 91,97%; dan (4) SPH-Tanaman Hias dengan presensi clean 92,47%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada Sinkronisasi Angka Sementara Hortikultura Tahun 2025 yaitu : (1) Penurunan produksi banyak ditemui disebabkan absensi laporan sudah 100% clean namun isian nol; (2) Kualitas data perlu diperhatikan karena data yang tidak representatif akan menyebabkan pengambilan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota



Direktur Statistik Sumber Daya Hayati-BPS

sebagai pembina data agar tetap dilibatkan dalam pembahasan data SPH di daerah; (3) Penurunan atau peningkatan luas panen maupun produksi yang signifikan agar diberikan penjelasan dan menjadi perhatian dengan membandingkan data-data tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), selain data statistik juga dibutuhkan penjelasan terkait fenomena alam yang menyebabkan peningkatan/penurunan tersebut; (4) Justifikasi penyebab peningkatan/penurunan produksi dan luas panen komoditas segera disampaikan dari bidang teknis yang menangani komoditas kepada petugas SPH Dinas Pertanian Provinsi maupun Dinas Pertanian Kabupaten agar dapat diinput ke dalam aplikasi sipedas sebelum pelaksanaan ATAP; (5) Telah disepakati antara Ditjen Hortikultura dan BPS bahwa entri SPH online akan dibuka kembali tanggal 9 s.d. 27 Februari 2026 sebelum ditetapkan menjadi Angka Tetap Hortikultura Tahun 2025; dan (6) Finalisasi Angka Tetap Hortikultura Tahun 2025 akan dilaksanakan secara daring pada tanggal awal bulan Maret 2025. Oleh karena itu diharapkan petugas data SPH Dinas Pertanian dan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap melakukan koordinasi sebelum angka ditetapkan.

Perkembangan Produksi Kelompok Tanaman Subsektor Hortikultura

A. Kelompok Tanaman Sayuran

Secara nasional, total produksi sayuran pada tahun 2025 sebesar 150.299.411 kuintal, meningkat 2.858.761 kuintal atau 1,94 persen dibandingkan tahun 2024. Total produksi komoditas sayuran strategis (bawang merah, bawang putih, dan aneka cabai) pada tahun 2025 mengalami peningkatan produksi sebesar 9,91 persen. Sayuran lainya yang mengalami peningkatan produksi signifikan, yaitu tomat, mentimun, kangkong dan terung. Sedangkan kubis, petai, petsai/sawi, wortel, kentang, labu siam, melinjo, bawang daun, kajang Panjang, paprika, dan jengkol menurun produksinya

B. Kelompok Tanaman Buah

Secara nasional, total produksi buah pada tahun 2025 sebesar 276.355.942 kuintal, turun 13.972.448 kuintal atau -4,81 persen dibandingkan tahun 2024. Tanaman buah yang mengalami penurunan produksi yang signifikan adalah salak, durian, rambutan, mangga, duku/ langsung/kokosan, nanas, manggis, jeruk siam/ keprok, Nangka/Cempedak, semangka dan jambu biji. Sedangkan tanaman buah yang mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan, yaitu buah naga, pisang, alpukat, pepaya, apel dan stroberi.

C. Kelompok Tanaman Biofarmaka

Secara nasional, total produksi tanaman biofarmaka pada tahun 2025 sebesar 734.873.818 kilogram, turun 35.551.084 Kg atau -4,61 persen dibandingkan tahun 2024. Tanaman biofarmaka yang mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan, yaitu kunyit, jahe, laos/lengkuas, jeruk nipis, serai hijau, temukunci, temu ireng, lempuyang, mengkudu/pace dan kencur. Peningkatan produksi yang cukup signifikan untuk beberapa tanaman biofarmaka, antara lain: kapulaga dan temulawak

D. Kelompok Tanaman Hias

Secara nasional, total produksi bunga potong pada tahun 2025 sebesar 850.696.697 tangkai, naik 19.487.538 tangkai atau 2,34 persen dibandingkan tahun 2024. Tanaman hias bunga potong yang mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan, adalah sedap malam dan mawar. Sedangkan krisan dan Melati produksinya turun signifikan. Tanaman hias lainnya secara umum mengalami penurunan produksi, antara lain Melati, dracaena, gerbera/ herbras dan anthurium bunga

Sinkronisasi Angka Sementara Hortikultura Tahun 2025 menjadi bukti bahwa kolaborasi antar lembaga mampu menghasilkan tata kelola data yang lebih baik. Sinergi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian tidak hanya menyatukan angka, tetapi juga menyatukan visi dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Di era transformasi digital dan tuntutan transparansi publik, kehadiran Satu Data Hortikultura menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan berbasis pada fakta, setiap program dapat dievaluasi secara objektif, dan setiap langkah

pembangunan pertanian berjalan dengan arah yang jelas.

Melalui komitmen bersama, data bukan lagi sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. (Suyati-Kelompok Data Komoditas)

Penulis: Suyati

Ketika Penyuluh Pertanian Diminta Merangkap Pengumpul Data

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) selama ini dikenal sebagai garda terdepan pembangunan pertanian. Mereka hadir langsung di tengah petani, mendampingi kelompok tani, subak, atau subak abian, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan. Di setiap kecamatan, penyuluh telah memiliki wilayah binaan (wilbin) yang jelas, sehingga perannya sangat strategis dalam mentransfer teknologi dan inovasi sesuai potensi wilayah setempat.

Tugas utama penyuluh bukanlah hal ringan. Mereka membina kelompok tani dengan tujuan membawa perubahan nyata seperti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (PSK) petani. Selain mendampingi proses budidaya, penyuluh juga wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program. Dengan beban tersebut, penyuluh sejatinya telah memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat tapak.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana baru: penyuluh pertanian ditugaskan sekaligus sebagai pengumpul data di tingkat kecamatan. Padahal, selama ini pengumpulan data pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan dilaksanakan oleh petugas khusus, seperti Mantri Tani, Mantri Kebun, Mantri Peternakan, serta Mantri Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) khusus untuk data tanaman pangan dan hortikultura. Tidak semua wilayah memiliki petugas yang lengkap, tetapi setidaknya ada pembagian peran yang relatif jelas.

Pertanyaan pun mengemuka, apakah perekrutan petugas pengumpul data tersebut masih berlanjut? Jika tidak, mengapa beban

pengumpulan data justru dialihkan kepada penyuluh pertanian? Dan yang tak kalah penting, apakah pengalihan peran ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat?

Jika memang ke depan pengumpulan data pertanian sepenuhnya dibebankan kepada penyuluh, maka negara perlu hadir melalui payung hukum yang jelas dan tegas. Aturan tersebut idealnya disiapkan oleh Badan PPSPDM Pertanian bersama Biro Hukum Kementerian Pertanian, agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas maupun ketidakpastian bagi penyuluh di lapangan.

Penegasan tugas menjadi sangat penting. Apabila penyuluh diminta merangkap sebagai pengumpul data, maka rincian tugasnya perlu dituliskan secara eksplisit. Mulai dari peran sebagai demonstrator (percontohan usaha tani, ternak, hortikultura, dan perkebunan), hingga pengumpulan data sektor pertanian sesuai periode dan standar yang ditetapkan. Tanpa kejelasan ini, penyuluh berisiko terbebani pekerjaan administratif yang justru mengurangi fokus pendampingan petani.

Sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik hingga kini masih menempatkan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) di setiap kecamatan. KSK yang dulu dikenal sebagai Mantri Statistik merupakan tenaga fungsional dengan tugas khusus mengelola data statistik. Mereka menjalankan survei, sensus, pengolahan data, serta membantu camat dalam pembinaan statistik desa. Dalam struktur BPS, KSK bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota dan bekerja secara profesional sesuai standar statistik nasional.

Rincian tugas KSK pun sangat jelas, mulai dari mengikuti pelatihan statistik, melakukan pencacahan, memastikan kualitas data, hingga menyusun publikasi “Kecamatan Dalam Angka”. Kejelasan mandat ini membuat pengelolaan data statistik tetap terjaga akurasi dan kredibilitasnya.

Dari sini, satu hal menjadi terang, pengumpulan data bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan pekerjaan profesional yang membutuhkan kompetensi, waktu, dan tanggung jawab tersendiri. Jika penyuluh pertanian diminta mengambil peran tersebut, maka kebijakan itu harus disertai regulasi yang kuat, pembagian tugas yang adil, serta dukungan kapasitas yang

memadai.

Tanpa itu semua, alih-alih memperkuat basis data pertanian, kebijakan ini justru berpotensi melemahkan peran utama penyuluh yakni mendampingi petani dan memastikan pembangunan pertanian berjalan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Penulis:Roch Widaningsih

Gerakan Tanam Padi Program Cetak Sawah Rakyat: Penguatan Produksi Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi padi melalui perluasan lahan sawah baru, optimalisasi lahan eksisting, serta penguatan kelembagaan petani. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan struktural pertanian, antara lain keterbatasan lahan produktif, fragmentasi kepemilikan, dan kebutuhan modernisasi praktik budidaya.



Foto Bersama Gerakan Tanam di Lahan CSR 2025 di Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim

Gerakan Tanam Padi berfungsi sebagai katalis implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis wilayah, gerakan ini mendorong percepatan tanam, sinkronisasi kalender tanam, serta adopsi teknologi dan sarana produksi yang tepat guna. Di tingkat daerah, kebijakan nasional ini diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga tercipta koherensi antara tujuan nasional dan prioritas lokal.

Provinsi Sumatera Selatan, dengan potensi lahan dan sumber daya manusia yang besar,

menjadi Lokasi khusus penting pelaksanaan program ini. Pada tataran implementasi, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan Muara Enim menunjukkan komitmen kuat melalui kegiatan Gerakan Tanam Padi yang berlokasi di Desa Banding Agung, Kecamatan Suku Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, serta Desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tanam, melainkan manifestasi kebijakan pembangunan pangan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Gerakan Tanam Padi Program CSR turut dihadiri Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Kementerian Pertanian, Dr. Ir Ali Jamil, M.P., Ph.D., Kepala Pusat Data dan Sistem Inforasi Pertanian Ibu Intan Rahayu, S.Si., M.T., Kepala Dinas Pertanian OKU Timur Junaidi, S.P., M.M., Pabung OKU Timur Kodim 0403/OKU Mayor Arm Efendi Tapubolon, unsur Forkopimda OKU Timur, para Danramil jajaran Kodim 0403/OKU wilayah OKU Timur, Camat Madang Suku III Kepala Desa Banding Agung, Gapoktan Desa Banding Agung, serta tokoh masyarakat setempat yang di laksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Staf Khusus Menteri Pertanian RI Bidang Infrastruktur Dr. Ali Jamil, S.P., menjelaskan bahwa kegiatan tabur benih padi ini dilaksanakan di lahan Cetak Sawah Rakyat seluas $\pm 46,8$ hektare. Namun, pada tahap awal, lahan yang siap dilakukan penanaman baru seluas ± 12 hektare. Program cetak sawah rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produksi beras nasional, serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.

Kepala Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan CSR dan Oplah di Sumatera Selatan, termasuk capaian fisik dan realisasi tanam yang telah dicapai hingga saat ini. Progres CSR di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga disampaikan oleh Danrem 044/Garuda Dempo. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D., dalam paparannya menyampaikan

evaluasi capaian realisasi tanam Oplah dan CSR Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan. Program CSR mencatat realisasi fisik sebesar 29,67 persen dengan realisasi tanam 0,97 persen, sementara program Oplah mencapai realisasi fisik 88,45 persen dan realisasi tanam 68,31 persen.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi Langkah nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten OKU Timur. Program cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menambah luas baku sawah dan meningkatkan produksi padi, yang diharapkan mampu memperkuat produksi beras serta kesejahteraan petani setempat.

Kabupaten OKU Timur – Desa Banding Agung, Kecamatan Suku Madang Suku III

Kabupaten OKU Timur dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sumatera Selatan. Kondisi agroklimat yang relatif mendukung, ketersediaan sumber air, serta tradisi bertani yang kuat menjadi modal utama. Desa Banding Agung di Kecamatan Suku Madang Suku III memiliki potensi lahan yang strategis untuk pengembangan sawah rakyat.

Program Cetak Sawah Rakyat di desa ini diarahkan pada pembukaan dan pengolahan lahan baru yang memenuhi standar teknis pertanian berkelanjutan. Kegiatan Gerakan Tanam Padi dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan, serta dukungan pemerintah daerah. Pemilihan varietas unggul, penerapan teknik tanam jarak legowo, dan penggunaan pupuk berimbang menjadi bagian dari paket teknologi yang diterapkan.

Kabupaten Muara Enim – Desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida

Desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, memiliki karakteristik lahan yang beragam, termasuk lahan rawa dan tadah hujan. Melalui Program Cetak Sawah Rakyat, potensi tersebut dioptimalkan dengan pendekatan teknis yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Gerakan Tanam Padi di wilayah ini menitikberatkan pada pengelolaan air, perbaikan struktur tanah, serta penguatan kapasitas petani

dalam menghadapi risiko iklim. Kolaborasi lintas sektor mulai dari dinas pertanian, aparat desa, hingga unsur TNI/Polri memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Keberhasilan Gerakan Tanam Padi tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan dan penyediaan anggaran, sementara pemerintah daerah memastikan implementasi berjalan efektif. Kelompok tani menjadi aktor utama di lapangan, didukung oleh penyuluh, akademisi, dan mitra swasta. Di Desa Banding Agung dan Desa Kayuara Batu, kepemimpinan lokal kepala desa dan tokoh masyarakat berperan penting dalam membangun partisipasi dan kepercayaan petani. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi Program Cetak Sawah Rakyat melalui Gerakan Tanam Padi memberikan dampak multidimensi. Dari sisi ekonomi, peningkatan luas tanam dan produktivitas berkontribusi pada kenaikan pendapatan petani dan penguatan ekonomi desa. Dari sisi sosial, kegiatan ini memperkuat kohesi komunitas, meningkatkan kapasitas petani, dan membuka peluang kerja di sektor pertanian. Selain itu, keberhasilan di tingkat lokal berkontribusi pada stabilitas pasokan pangan regional dan nasional. Dengan demikian, Gerakan Tanam Padi tidak hanya berdampak pada wilayah pelaksanaan, tetapi juga pada sistem pangan secara keseluruhan.

Gerakan Tanam Padi dalam Program Cetak Sawah Rakyat merupakan instrumen strategis penguatan produksi pangan. Melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis wilayah, program ini menjadi fondasi penting menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.

Penulis: Suyati dan Pulung Sadana



satudata.pertanian.go.id